



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2484>
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS DIGITAL (STUDI DI KABUPATEN BANYUMAS)

Teddy Rusmawan¹, Denok Kurniasih², Paulus Israwan Setyoko³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta

² Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

³ Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

teddy.rusmawan@stik-ptik.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 14 Oktober 2022

Revised date: 20 Oktober 2022

Accepted date: 30 Oktober 2022

ABSTRACT

Collaborative governance is the government's effort in dealing with an increasingly occurring problem. The government's efforts that are considered effective, especially in the post-covid-19 era, are implementing several digitalization programs. One of the efforts to digitize the program was carried out by the Banyumas Regency Government as an innovation in dealing with the waste problem. By establishing a synergy between the Banyumas Regency Government through the Banyumas Regency Environmental Service, PT Banyumas Investama Jaya (BIJ), and Non-Governmental Organizations (KSM) and the general public, it is hoped that they can encourage digital-based waste management programs that meet the expectations of all parties. The purpose of this article is to describe the collaborative governance process in digital-based waste management in Banyumas Regency. The method used is descriptive qualitative with data collection, namely interviews, observations and documentation. The results show that collaborative governance in digital-based waste management in Banyumas Regency is running well. The collaboration process that has been carried out has been seen from the dialogue carried out between sectors, the building of trust and commitment between each stakeholder, and a sense of mutual understanding, as well as the provisional results and the collaboration process carried out.

Keywords: Collaborative governance , Digital Waste Management, New Habit Adaptation Era.

ABSTRAKSI

Collaborative governance menjadi upaya pemerintah dalam menangani suatu permasalahan yang kian terjadi. Upaya pemerintah yang dirasa efektif terutama di era pasca pandemi covid 19 adalah dengan menerapkan beberapa program digitalisasi. Salah satu upaya program digitalisasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai inovasi dalam menangani persoalan sampah. Dengan membentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, PT Banyumas Investama Jaya (BIJ), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta masyarakat umum diharapkan dapat mendorong program pengelolaan sampah berbasis digital yang sesuai harapan semua pihak. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah berbasis digital di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa collaborative governance dalam

pengelolaan sampah berbasis digital di Kabupaten Banyumas berjalan cukup baik. Proses kolaborasi yang dilakukan sudah terlihat dari dialog yang dilakukan antar sektor, terbangunnya kepercayaan dan komitmen antara setiap stakeholder, dan adanya rasa saling memahami, serta adanya hasil sementara dan proses kolaborasi yang dilakukan.

Kata kunci: *Collaborative governance* , Pengelolaan Sampah Digital, Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Kata kunci: kinerja guru UKS, budaya dan nilai spiritual

2022 UPNVJT. All rights reserved

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan salah satunya adalah dengan menciptakan sinergitas antara berbagai sektor diantaranya adalah bekerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat. Model sinergitas yang melibatkan antara ketiga sektor tersebut dinamakan *collaborative governance* . Seperti halnya dinyatakan oleh Thomson dan Perry (2006) bahwa *collaborative governance* merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah konflik sosial yang telah berlangsung lama antara berbagai pemangku kepentingan, membuat rencana pembangunan daerah, dan mengembangkan kebijakan perlindungan lingkungan melalui pengorganisasian mandiri di antara para pemangku kepentingan yang inovatif, bijaksana, dan saling menguntungkan.

Collaborative governance menjadi langkah strategis membentuk kekuatan baru dari potensi yang dimiliki masing-masing sektor, serta dapat saling menutupi kelemahan diantara sektor tersebut. Dengan demikian capaian suatu program atau pemecahan permasalahan yang sulit dan mustahil dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut didukung pernyataan Mattessich, 1992; Montiel-Overall, 2005; Gieseke 2020 yang menyatakan bahwa kolaborasi dikenal sebagai hubungan yang saling menguntungkan dan terdefinisi dengan baik yang telah dilakukan oleh dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan tersebut mencakup komitmen terhadap hubungan dan tujuan bersama; struktur yang dikembangkan bersama dan tanggung jawab bersama; otoritas bersama dan akuntabilitas untuk sukses; dan berbagi sumber daya dan penghargaan. Bahkan Janine O'Flynn (2008:181) menyatakan bahwa Pemerintah di seluruh dunia harus mengembangkan kemampuan untuk berada dalam kondisi berkolaborasi jika mereka ingin secara kompeten menghadapi tantangan abad kedua puluh satu dan menyatakan bahwa masa depan milik mereka yang berkolaborasi, bahkan terdengar pada

KTT Pemerintah Australia 2020 pada bulan April 2008, di mana gagasan tentang pemerintahan kolaboratif diangkat sebagai gagasan utama yang dapat mendorong bangsa melalui dekade berikutnya. Sejalan dengan itu Rahayu (2002) menyatakan dalam penelitiannya kondisi di lapangan menunjukkan bahwa upaya kolaborasi dirasa cukup berhasil dalam program pemberdayaan perempuan terhadap keluarga terdampak covid 19.

Pencemaran lingkungan menjadi permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi perhatian dunia. Hal tersebut seperti yang dinyatakan Khan dkk (2022) meningkat di provinsi Shandong, Guangdong, Zhejiang, dan Fujian, tetapi menurun di kota-kota pesisir timur lainnya, provinsi, dan zona khusus. Selain itu, limbah padat perkotaan di China diolah dengan menggunakan 52 persen TPA, 45 persen insinerasi, dan 3 persen teknik pengomposan, yang menghasilkan efisiensi penggunaan yang jauh lebih rendah daripada di negara maju. Efektivitas sistem pengelolaan sampah kota China harus ditingkatkan. Selain itu, tinjauan ini mengkaji masalah dan prospek pengelolaan MSW di Cina, serta rekomendasi untuk memperkuat sistem pengelolaan MSW.

Penemuan plastik pada abad ke-20 memberikan pengaruh dalam pemanfaatannya sebagai bagian dari konsumsi rumah tangga. Namun penemuan plastik menimbulkan permasalahan yaitu ketika plastik menjadi suatu limbah yang sulit terurai, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satu negara dengan penghasil sampah plastik terbesar di dunia adalah Indonesia. Dikutip dari medcom.id yang dimuat pada tahun 2021 diakses pada 26 Maret 2022 Pukul 11:25 WIB menunjukkan bahwa Indonesia sebagai penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah China yaitu sebesar 3,21 juta metrik ton/tahun. Hal tersebut menjadi perhatian negara untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan sampah plastik. Pada kenyataannya program pengelolaan sampah plastik di Indonesia masih belum diupayakan secara optimal. Dimuat

dalam liputan6.com pada tahun 2019 yang diakses pada 26 Maret 2022 Pukul 11:33 WIB menyebutkan bahwa dalam pengelolaan limbah plastik Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia.

Berikut dapat ditunjukkan capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2021 yang terdiri dari 242 Kabupaten/kota se-Indonesia.

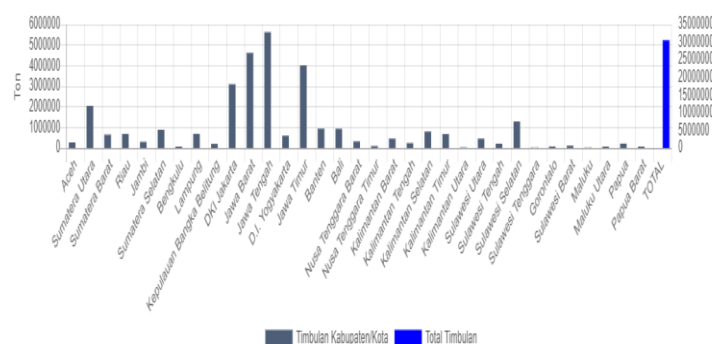
Tabel 1. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah pada Tahun 2021 yang Terdiri Dari 242 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah (Ton/Tahun)	Penanganan Sampah (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Sampah Tidak Terkelola (Ton/Tahun)
30.429.174	4.747.149 (15,6 %)	14.965.364 (49,18 %)	19.712.513 (64,78 %)	10.716.660 (35,22 %)

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>. Diakses pada 4 Agustus 2022, Pukul 13.53 WIB.

Pada tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya sampah yang belum terkelola di Indonesia yaitu sebesar 35,22 persen. Hal demikian menjadi perhatian bagi setiap daerah atau kota dalam pengelolaan sampah yang belum terkelola.

Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama dan dapat dikordinir oleh setiap pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten. Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan timbulan sampah terbesar di Indonesia yaitu sebesar 15.381,25 ton/hari dan 5.614.155,21 ton/tahun. Hal tersebut seperti ditunjukkan pada gambar 1 berikut.



Hal tersebut menjadi tanggungjawab bersama untuk dapat mengelola sampah yang ada, sehingga permasalahan sampah baik di Provinsi Jawa Tengah dapat teratasi.

Salah satu Kabupaten dengan volume sampah yang tinggi di Jawa Tengah adalah Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2021 timbulan sampah perhari Kabupaten Banyumas menghasilkan 535,23 dan pertahun menghasilkan 195.357,75 ton (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbula> n. Diakses pada 4 Agustus 2022, Pukul 14.20 WIB).

Sulitnya penyelesaian masalah sampah di Indonesia diikuti banyaknya tantangan baru yang selalu muncul diantaranya adalah tuntutan adaptasi kebiasaan baru setelah adanya pandemi covid 19 yang terjadi di seluruh dunia. Tantangan tersebut membuat perubahan disetiap aspek kehidupan terutama kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di birokrasi pemerintahan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis digital menjadi perhatian dan dijadikan suatu alat untuk mencapai pelayanan publik yang efektif dan efisien. Upaya digitalisasi dalam pelayanan tersebut sudah banyak diterapkan dalam berbagai pelayanan publik salah satunya adalah di Kabupaten Banyumas dalam permasalahan yang krusial yaitu masalah pengelolaan sampah. Pada tahun 2018 Kabupaten Banyumas mengalami krisis sampah. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Banyumas bahwa pada bulan april tahun 2018 dua TPA (tempat Pembuangan Akhir) dari tiga TPA yang ada sudah ditutup oleh warga (Sumber: Instagram [ir_achmadhusein](#) yang diposting 13 April 2022). Seperti halnya diungkapkan oleh Futrell (2003) bahwa ketika pemangku kepentingan sangat saling bergantung, adanya permasalahan dapat menciptakan untuk terjadinya tata kelola kolaboratif. Adanya tuntutan dan keterdesakan dapat menciptakan dorongan kuat untuk terciptanya tata kelola kolaboratif.

Upaya yang dianggap efektif dan efisien terutama dalam menghadapi era adaptasi kebiasaan baru dan tantangan era revolusi industri terbaru dalam penanganan sampah yang berkelanjutan adalah menciptakan pengelolaan sampah yang berbasis digital. Jiwa gotong royong yang dimiliki masyarakat Indonesia merupakan suatu potensi mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Peran seluruh elemen baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat dalam mencari solusi pengelolaan sampah menjadi sangatlah penting. Kenyataannya dalam mencari solusi terbaik dalam pengelolaan sampah, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga perlu adanya peran serta masyarakat dan pihak lainnya. Penelitian Brust dkk (2020) menunjukkan bahwa “ada berbagai

jenis kolaborasi sebagai mekanisme tata kelola untuk kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan dan bahwa pengaturan tata kelola alternatif harus digabungkan”. Suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa sektor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat menciptakan suatu kolaborasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Kolaborasi antar ketiga sektor tersebut dapat menjawab permasalahan dan akan menjadi solusi dalam pengelolaan sampah.

Ada dua program digitalisasi dalam bentuk aplikasi pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas yang dapat digunakan masyarakat diantaranya adalah Salinmas (Sampah Online Banyumas) dan Jeknyong (Ojeke Nyong). Salinmas digunakan untuk mengelola sampah organik dan Jeknyong digunakan untuk mengelola sampah anorganik. Dua program tersebut menjadi solusi untuk mewujudkan Kabupaten Banyumas tanpa sampah atau dikenal dengan program zero waste. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah berbasis digital tersebut diantaranya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas bersama camat dan kepala desa atau lurah di Kabupaten Banyumas, selain itu sektor lain yaitu masyarakat umum pengguna aplikasi maupun pihak KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), serta keterlibatan PT Banyumas Investama Jaya (BIJ) dalam pengelolaan sampah anorganik.

METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam artikel ini menggunakan teknik purposive sampling diantaranya adalah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Direktur PT Banyumas Investama Jaya, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan masyarakat pengguna aplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative governance menjadi upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan beberapa masalah yang ada. *Collaborative governance* yang efektif harus akuntabel dan mengarah pada nilai publik serta hasil yang efektif. Seperti halnya dinyatakan dalam Voets et al. (2021) bahwa *collaborative governance* yang disengaja dan deliberatif dapat dihasilkan dari

kesadaran yang lebih dalam tentang proses dan struktur, serta membutuhkan strategi manajemen yang aktif dan cerdas serta peran kepemimpinan untuk dilaksanakan juga mengakui pentingnya menyadari kerugian, risiko, dan kendala dalam melakukannya. Dengan demikian *collaborative governance* dilakukan untuk mencapai hasil atau tujuan yang efektif.

Ansel dan Gash (2007) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. *Collaborative governance* menyatukan beberapa kepentingan setiap setor diantaranya adalah sektor dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses kolaborasi tersebut didasarkan pada beberapa aspek diantaranya adalah menurut Ansell dan Gash (2007) yaitu proses dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, sikap saling memahami, dan hasil sementara. Kelima aspek tersebut merupakan ukuran dalam menentukan proses *collaborative governance* yang dilakukan di Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sampah berbasis digital di era adaptasi kebiasaan baru.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah berbasis digital di era adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Banyumas berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari beberapa aspek pada proses *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash (2007) diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka merupakan kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk melihat kolaborasi secara keseluruhan. Dialog tatap muka dimungkinkan untuk memperkuat perbedaan antar para stakeholder, sehingga tanpa dialog tatap muka kolaborasi tidak akan terjadi (Ansel dan Gash: 2007). Adanya dialog, koordinasi, maupun sosialisasi baik secara virtual maupun secara tatap muka yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),

masyarakat umum pengguna aplikasi, dan PT Banyumas Investama Jaya (BIJ) untuk menentukan arah pengelolaan dan capaian bersama untuk masing-masing kepentingan. Sejalan dengan itu Kurniawan et al. (2022) menyatakan bahwa koordinasi antar OPD dapat dilakukan dengan komunikasi dua arah yakni saling memberi pendapat, saran dan kritikan; menghindari adanya perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah; menghasilkan kebijakan yang saling melengkapi juga menyepakati aturan bersama mengenai hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak; dan mencapai kesamaan prioritas yang jelas bahwa pengembangan sentra industri slag alumunium harus mengutamakan kesejahteraan sekaligus perlindungan lingkungan hidup.

Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas kepada sektor lain sebagai bentuk upaya pengenalan program dengan aplikasi yaitu *salinmas* dan *jeknyong*. Bentuk dialog dan koordinasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan PT Banyumas Investama Jaya (BIJ) dalam mengelola sampah dari masyarakat umum pengguna aplikasi hingga berhasil menjadi produk yang bermanfaat yaitu paving, batako dan genteng berbahan dasar sampah anorganik.

2. Proses Membangun Kepercayaan

Para pemangku kepentingan dalam proses kolaboratif yang baik menyadari bahwa mereka harus membangun kepercayaan di antara setiap sektor yang terlibat. Membangun kepercayaan merupakan proses yang memakan waktu yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif (Ansel dan Gash: 2007). Kepercayaan dibangun atas dasar pencapaian tujuan bersama yaitu menciptakan lingkungan di wilayah Kabupaten Banyumas bebas sampah serta kepercayaan dalam melihat potensi masing-masing sektor dalam menjalankan fungsinya.

Pemerintah Daerah bersama koordinator wilayah kecamatan hingga desa/kelurahan membuat kebijakan maupun ketetapan yang akan dijalankan, sebagai pihak yang memfasilitasi pelaksanaan kolaborasi, memverifikasi dan sebagai supervisi. Lalu pihak masyarakat yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengepul dan sekaligus pengelola limbah langsung dari

masyarakat pengguna aplikasi *salinmas* dan *jeknyong*. Selain itu pihak masyarakat pengguna aplikasi terutama wilayah kotip Purwokerto sudah cukup antusias dalam menggunakan aplikasi yang disediakan. Pihak lain yaitu pihak swasta yang dikelola oleh Banyumas Investama jaya (BIJ) sebagai produsen pengolahan sampah dari KSM yang akan diolah menjadi barang bernilai ekonomi.

Membangun kepercayaan para pemangku kepentingan juga dapat didasarkan pada keuntungan atas kepentingan yang dimiliki setiap sektor. Hal tersebut dilihat dari berbagai kepentingan setiap sektor diantaranya adalah pemerintah memiliki kepentingan pencapaian tujuan untuk menjalankan program Banyumas bebas sampah dengan mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat. Pihak lain yaitu KSM sebagai pengelola sampah menjadi fasilitator dari penjemputan hingga pengumpulan sampah dengan orientasi keuntungan. Sedangkan masyarakat umum pengguna aplikasi dapat dengan mudah mendistribusikan sampahnya dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sampah kepada pengelola sampah. Khusus untuk sampah anorganik pihak PT BIJ membeli bahan dasar pokok yaitu sampah anorganik dan mengelolanya menjadi produk yang memiliki nilai jual.

3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses kolaboratif membutuhkan kesediaan untuk mematuhi penetapan hasil musyawarah. Dalam negosiasi mengarah ke arah yang tidak terduga dan pemangku kepentingan dapat mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri. Komitmen bergantung pada kepercayaan bahwa setiap pemangku kepentingan akan saling menghormati perspektif masing-masing. Ansel dan Gash (2007) menyatakan bahwa prosedur yang jelas, adil, dan transparan sangat penting untuk adanya komitmen setiap pemangku kepentingan. Sebelum berkomitmen pada proses yang bisa berjalan ke arah yang tidak terduga, para pemangku kepentingan harus merasa yakin bahwa prosedur musyawarah dan negosiasi memiliki integritas.

Komitmen antar sektor menjadi penentu arah kolaborasi yang dilakukan. Komitmen yang ditunjukkan setiap sektor dengan berdasar pada kepentingan masing-masing. Setiap sektor tentu memiliki kepentingannya masing-masing terhadap kendala yang muncul di lapangan. Hal tersebut membuat proses kolaborasi juga banyak berbagai

kendala dan permasalahan. Seperti yang dinyatakan Mukhlis dan Perdana (2022) kolaborasi dalam pendekatan *governance* yang dipuja sebagai metode optimal untuk implementasi kebijakan publik jangka panjang tidak selalu mulus, *collaborative governance* masih rentan gagal karena faktor budaya, kelembagaan, dan politik. Sejalan dengan itu Newig et al (2018) menyatakan bahwa partisipasi dapat mengarah pada hasil lingkungan yang lebih baik atau lebih buruk. Hal lain diungkapkan oleh Erikson dan Larsson (2019) yang menyatakan bahwa meskipun tata kelola kolaboratif telah memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk bidang tersebut, hal itu juga memperkenalkan jenis masalah baru, khususnya peningkatan yang signifikan dalam informalitas dan pengambilan keputusan di luar kerangka hukum, terutama oleh aktor masyarakat sipil.

Kenyataannya pemahaman antar sektor dengan terbangunnya sebuah kepercayaan menjadi solusi dalam pemecahan suatu permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas. Adanya pemahaman mengenai potensi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki setiap sektor menjadi pertimbangan dalam upaya kolaborasi.

4. Sikap Saling memahami

Dalam proses kolaboratif, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama. Pemahaman bersama ditunjukkan dengan tujuan bersama. Blatner dkk. (2001) menyatakan bahwa pengembangan pemahaman bersama dapat dilihat sebagai bagian dari “proses pembelajaran kolaboratif” yang lebih besar. Aspek sikap saling memahami antar sektor tersebut secara keseluruhan berwujud pada penentuan visi dan misi secara umum yaitu menciptakan Banyumas yang bebas dari sampah. Pengelolaan sampah berbasis digital menjadi salah satu inovasi terbaru dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dimengerti oleh setiap setor yang berkolaborasi sehingga kendala yang muncul dapat diselesaikan dengan koordinasi dan dialog antar sektor.

5. Hasil Sementara

Kolaborasi lebih mungkin terjadi ketika kemungkinan tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat terlihat secara nyata. Meskipun hasil sementara ini dapat mewakili keluaran nyata dalam setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Hasil sementara yang nyata ini dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif,

mendorong siklus pembangunan kepercayaan dan komitmen yang baik (Ansel dan Gash: 2007). Pengurangan volume sampah secara signifikan di Kabupaten Banyumas saat ini merupakan hasil sementara dari program kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan sampah berbasis digital. Selain itu, hasil jangka pendek dari kerjasama ketiga sektor tersebut dapat menghasilkan daur ulang sampah anorganik menjadi sesuatu yang menguntungkan. Akibat dari daur ulang sampah anorganik dalam pengelolaan sampah ini adalah daur ulang sampah anorganik menjadi paving, batako, dan genteng. Jumlah sampah yang menumpuk di berbagai wilayah Kabupaten Banyumas dapat dikurangi berkat fasilitas tersebut, yang juga membantu upaya pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Selain itu upaya pengelolaan sampah berbasis digital sangat efektif dan efisien dengan kolaborasi yang dilakukan beberapa sektor. Hal tersebut menjadi sebuah rencana strategis di masa yang akan datang untuk menciptakan pengelolaan kolaboratif dengan berbasis digital.

KESIMPULAN

Proses kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa sektor yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, PT Banyumas Investama Jaya dan pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta masyarakat umum pengguna aplikasi sudah dilakukan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya proses dialog baik secara virtual maupun tatap muka antara semua sektor baik berupa koordinasi maupun sosialisasi. Selain itu terciptanya proses membangun kepercayaan antar masing-masing sektor yang ditunjukkan dengan pemahaman pencapaian tujuan secara umum dan berdasar pada keuntungan yang diperoleh setiap pihak yang berkolaborasi. Selanjutnya terciptanya komitmen terhadap suatu proses dengan upaya yang dilakukan yaitu atas dasar pemahaman mengenai peran masing-masing sektor dengan pemahaman kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Terciptanya sikap saling memahami antar setiap sektor dengan cara saling memahami dalam penentuan visi dan misi secara umum yaitu menciptakan Banyumas yang bebas dari sampah. Sedangkan hasil sementara yang ditunjukkan diantaranya adalah adanya peluang usaha yang tercipta dengan pemanfaatan sampah organik maupun anorganik.

REFERENCES

- Ansell, Chris., Alison Gash. *Collaborative governance in Theory and Practice*. Published by Oxford University Press on behalf of the Journal of Public Administration Research and Theory, Inc. JPART 18:543–571.
- Blatner, Keith, Matthew Carroll, Steven Daniels, and Greg Walker. 2001. Evaluating the application of collaborative learning to the Wenatchee fire recovery planning effort. *Environmental Impact Assessment Review* 21:241–70.
- Brust, Diego Vazquez., Roberta Souza Piao., Mary Fernanda de Sousa de Melo., Rodrigo Trotta Yaryd., Marly M. Carvalho. 2020. The governance of collaboration for sustainable development: Exploring the “black box”. *Journal of Cleaner Production*.
- Erikson., and Larsson, O. L. 2019. Beyond Client Criminalization: Analyzing Collaborative Governance Arrangements for Combatting Prostitution and Trafficking in Sweden. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rego.12259>.
- Futrell, Robert. 2003. Technical adversarialism and participatory collaboration in the U.S. chemical weapons disposal program. *Science, Technology, & Human Values* 28:451–82.
- Gieseke, Timothy M. 2020. *Collaborative Environmental Governance Frameworks A Practical Guide*. Taylor & Francis Group, LLC
- Huxham, C., Vangen, S., Huxham, C., & Eden, C. (2000). The Challenge of *Collaborative governance* . *Public Management: An International Journal of Research and Theory*, 2(3), 337–358. doi:10.1080/147190300000000021
<https://www.instagram.com/p/CcS-OValJ9f/>.
Diposting 13 April 2022. Diakses pada 08 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.
<https://www.liputan6.com/global/read/4013236/5-negara-penghasil-limbah-plastik-terbanyak-di-dunia-ada-indonesia>. Diakses pada 26 Maret 2022 Pukul 11:33 WIB.
<https://www.medcom.id/ekonomi/sustainability/zNAXv9nK-amerika-serikat-penghasil-sampah-plastik-terbanyak-di-dunia-bagaimana-indonesia#:~:text=Jakarta%3A%20Amerika%20Serikat%20menjadi%20negara,dan%20gabungan%20negara%20Uni%20Eropa>. Diakses pada 26 Maret 2022 Pukul 11:25 WIB.
- Khan, Shamshad., Raheel Anjum, Syed Turab Raza, Nazir Ahmed Bazai, Muhammad Ihtisham (2022). Technologies for municipal solid waste management: Current status, challenges, and future perspectives. *Elsevier Chemosphere*, Volume 288, Part 1.
- Kurniawan, Badrudin., Indah Prabawati, Tauran. 2022. INTEGRASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN: Koordinasi Dalam Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. 12 No.01 Hal 93 – 104.
- Miles, M..B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Thehep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mukhlis, Maulana., Ryzal Perdana. 2022. A Critical Analysis of the Challenges of *Collaborative governance* in Climate Change Adaptation Policies in Bandar Lampung City, Indonesia. *Sustainability*, 14, 4077. <https://doi.org/10.3390/su14074077>.
- Newig, Jens., Edward Challies, Nicolas W. Jager, Elisa Kochskaemper, and Ana Adzersen. 2018. The Environmental Performance of Participatory and Collaborative Governance: A Framework of Causal Mechanisms. *The Policy Studies Journal*, Vol. 46, No. 2.
- O’Flynn, Janine., John Wanna. 2008. *Collaborative governance A new era of public policy in Australia?*. Published by ANU E Press The Australian National University.
- Rahayu, Wewen Kusumi. 2022. Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Perempuan Terhadap Keluarga Terdampak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu*

Administrasi Negara. Vol. 12 No. 01 Hal
119 – 130.

Voets, Joris., Taco Brandsen, Christopher Koliba,
Bram Verschuere. 2021. Collaborative
Governance. Oxford Research
Encyclopedias
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1419>.